



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 10 Juni 2018

Kajati Surati BPK Tanyakan Audit Dua Korupsi 'Jumbo'

Ambon - Kepala Kejati Maluku, Triyono Haryanto menyurati BPK RI untuk mem-pertanyakan hasil audit kerugian negara dalam kasus korupsi bernilai 'jumbo'. Kedua kasus itu adalah korupsi proyek pembangu-nan terminal transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tahun 2008-2009 dan kasus korupsi proyek Water Front City Namlea, Kabu-paten Buru tahun 2015-2016.

Surat Nomor : B-1178/S.1/Fd. 1/06/2018, tanggal 28 Juni 2018 itu, juga ditembuskan ke Kepala BPK RI dan Jaksa Agung.

“Benar saya telah menyurat pihak BPK untuk meminta penjelasan tentang pelaksa-naan audit kasus korupsi terminal transit dan kasus ko-rupsi proyek water front city. Surat itu tembusannya kepa-da Jaksa Agung dan Kepala BPK RI. Telah kami kirimkan dengan harapan proses ini bisa lancar dan cepat tuntas,” kata Triyono Haryanto ketika dikonfirmasi Siwalima, mela-lui Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapu-lette, Senin (9/7).

Selain surat, Kejati Maluku juga berkoordinasi secara lisan untuk mempercepat audit tersebut. Akibat audit kerugian ne-gara audit lamban, penunta-san kasus korupsi proyek terminal transit Passo dan pro-yek water front city Namlea terkatung-katung.

Tersangka

Untuk diketahui, dalam ka-sus dugaan korupsi terminal transit Passo, yang mengha-biskan anggaran lebih dari Rp 55 miliar, Kejati Maluku me-netapkan tiga orang men-jadi tersangka yaitu, konsul-tan pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri, Jhon Lucky Metubun, bos PT Reminal Uta-ma Sakti Amir Gaos Latu-consina dan PPTK proyek terminal Transit Passo tahun 2008-2009, Angganoto Ura.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Sementara kasus korupsi proyek Water Front City Namlea, yang diduga merugikan negara Rp 1,7 milyar, ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah, kuasa PT Aego Media Pratama Muhammad Duwila alias Memet, anggota DPRD Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar Sah-ran Umasugi, Sri Juriyanti selaku PPK, dan Wuhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas. (S-27)